

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Ruang lingkup kajian ilmu politik semakin berkembang tiap harinya, saat ini yang menjadi sorotan dalam di dunia perpolitikan adalah masalah lingkungan hidup. Politik lingkungan merupakan salah satu ilmu yang saat ini sedang berkembang dan menjadi persoalan. Politik lingkungan mengalami perkembangan pada tahun 1960 dan awal tahun 1970 (Daugverne, 2005). “Politik lingkungan mempunyai keterkaitan dengan penguasa, pemilihan sumber daya alam, perdagangan produk, juga berperan dalam memperjuangkan keadilan dan kelestarian lingkungan. Persoalan lingkungan merupakan masalah setiap negara yang membutuhkan kerjasama dalam penanganannya. Masalah lingkungan disampaikan dari setiap negara melalui sudut pandang yang berbeda diantaranya melalui moral, teknokrat, majerial (*Barkeley Workshop on Environmental Politics, 1999*).<sup>1</sup>”

Dalam mengurangi pencemaran sampah, pemerintah memberlakukan sistem 3R (*reduce, reuse, recyle*). Kebijakan pemerintah dalam menciptakan Kota Surabaya yang bebas dari pencemaran sampah yaitu dengan sistem *Green City* yang dilakukan dalam konsep pendekatan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan berkelanjutan, konsep tersebut dikenal sebagai Kota penghijauan. Dalam artian ini ekologis merupakan keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan Kota Surabaya yang mengutamakan kebersihan dan keindahan lingkungan. *Green City* merupakan sebutan dari Kota hijau dengan memiliki banyak ruang terbuka hijau yang digunakan sebagai pendukung sanitasi. Kota Surabaya disebut sebagai Kota *Green City* yang merupakan program dari bangunan penghijauan yang didukung oleh *Green Waste*. Hal ini agar pembangunan di Kota Surabaya dimasa selanjutnya yang lebih mengutamakan

---

<sup>1</sup> Congleton, R, D. 2002. *Environmental Politics and Economic Development*. George Mason University. Hal 6

kebersihan lingkungan, karena saat ini rusaknya lingkungan hidup banyak disebabkan oleh ulah manusia yaitu dari kurang pedulinya terhadap lingkungan sekitar. Aktivitas masyarakat dalam melakukan pembuangan sampah secara sembarangan sudah menjadi suatu kebiasaan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan menghambat saluran air.

Persentase komposisi sampah plastik pada tahun 2018 mencapai 15%, pada tahun 2017 mengalami penurunan angka sebesar 1%, jika dikorelasikan dengan timbulan sampah yang mencapai 65,79 ton pada tahun 2018. Penurunan timbulan sampah diperoleh dari hasil kerja keras berbagai pihak dengan kontribusi terbesar dari bank-bank sampah yang mencapai 7.488 unit bank sampah di seluruh wilayah Indonesia. Komunitas bank-bank sampah dapat membantu pemerintah dalam pengumpulan sampah yang bernilai jual dan bisa di daur ulang dari sampah rumah tangga. Upaya yang sering dilakukan oleh komunitas-komunitas bank sampah dalam mencegah sampah plastik terlepas ke lingkungan atau ke TPA serta membantu melakukan pemilahan antara sampah organik dan non organik yang berasal dari sampah rumah tangga. Sesuai data KLHK total timbulan sampah yang masuk ke TPA hanya 63% dan 10% didaur ulang, sisanya terbuang ke alam termasuk lautan, terdapat 38 juta ton sampah pertahun dan 1,29 juta ton sampah plastik yang terbuang ke laut. Pengurangan volume sampah khususnya sampah plastik bisa dilakukan oleh semua kalangan masyarakat dengan membiasakan tidak menggunakan bahan baku plastik dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.<sup>2</sup>

Interaksi dan kerjasama antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat yang banyak dilakukan di berbagai sektor dalam program pengelolaan sampah yang diarahkan untuk mencari titik terang atau solusi pada permasalahan yang melibatkan publik, pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. “Perubahan pola penyelenggaraan pemerintah yang melibatkan pemerintah, pihak

---

<sup>2</sup> Koran Harian Kompas, Kamis, 21 Februari 2019, Timbulan Sampah Plastik Berkurang (Upaya pemilahan dan pengelolaan sampah melalui bank sampah yang berkontribusi besar mengurangi timbulan sampah, terutama sampah plastik). Hal 1

swasta dan publik yang dikenal dengan pergeseran paradigma dari pemerintah (*government*) menjadi pemerintahan (*governance*) sebagai wujud dari interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat (Kooiman, 1993).<sup>3</sup>”

Gerakan Indonesia bersih akan terus dilakukan untuk mengurangi penumpukan sampah, dalam aksi ini tidak hanya sekedar mengumpulkan sampah tetapi juga dilakukan sosialisasi di berbagai organisasi dan lapisan masyarakat. Setelah tragedi longsor sampah di TPA Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat pada tahun 2005. Pemerintah terus mendorong masyarakat melalui bank sampah dan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengurangi sampah, peranan bank sampah juga harus terus dioptimalkan. Lokasi pembuangan sampah merupakan persoalan bagi setiap wilayah khususnya di Kota metropolitan seperti Jakarta. Jumlah volume sampah yang dihasilkan merupakan yang paling tinggi di Indonesia, lokasi pembuangan tersebut berpusat pada TPST Bantargebang. Wilayah TPST Bantargebang terletak diantara dua Kota yaitu Kota Bekasi dan Jakarta. Saat ini TPST Bantargebang di kelola langsung oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta, sebelumnya TPST Bantargebang di kelola oleh PT. Gedong Tua Jaya. TPST Bantargebang merupakan TPS terbesar yang ada di Indonesia dengan luas 110.3 hektar. TPST Bantargebang terbagi menjadi sejumlah blok pengelolaan yaitu 81,91 % di fungsikan. Terdapat 5 zona lahan urug sanitur, 19,09 % digunakan untuk sarana. Jumlah volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang setiap harinya mencapai 6.500-7.000 ton/hari. Sampah-sampah ini akan dipilah untuk di produksi menjadi kompos. Untuk sampah yang diproduksi menjadi kompos akan melalui proses panjang hingga siap dipasarkan dan ada juga yang dipadatkan menjadi tumpukan bukit sampah.<sup>4</sup>

Pengelolaan TPST Bantargebang semakin semerawut semenjak dipegang oleh Pemprov DKI Jakarta, banyak aspek yang dilanggar Dinas Lingkungan

---

<sup>3</sup> Sedarmayanti, 2012. *Good Governance* (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Edisi Revisi: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju *Good Governance*. Mandar Maju. Bandung. Hal 23

<sup>4</sup> [megapolitan.kompas.com/](http://megapolitan.kompas.com/). Luthfia Ayu Nazanella, Senin, 22 oktober 2018. 110 Hektar hingga 7.000 Ton Sampah Per Hari

Hidup DKI Jakarta. Banyaknya timbunan sampah yang tinggi berdampak pada kerusakan lingkungan. TPST Bantargebang Bekasi juga dinilai melanggar Undang-Undang karena tumpukan sampah hanya didibiarkan begitu saja diluar. “Hal ini disebutkan dalam UU No. 18 Tahun 2008 Pasal 29 Huruf (e) tentang UU Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah di tentukan dan disediakan.<sup>5</sup>” Pengurangan sampah di tingkat Nasional pada tahun 2018 mencapai 2,76 persen dari tahun 2017 yang hanya 2,12 persen, dan terdapat 68,13 persen yang dikelola. “Angka pengurangan sampah tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.<sup>6</sup>”

Di kota-kota besar selanjutnya seperti Surabaya yang juga memiliki kepadatan penduduk mencapai 3.074.490 jiwa juga mempengaruhi jumlah volume sampah di Surabaya. Jumlah timbulan sampah harian Kota Surabaya yang diperoleh mencapai 2.790.89 ton/hari, luas daerah pelayanan sampah 285.67 Km<sup>2</sup>, jumlah sampah yang ditimbun di TPA mencapai 1.477 ton/hari, jumlah sampah terolah kompositing 307.14 ton/hari, jumlah sampah terolah daur ulang bahan baku 715.87 ton/hari, jumlah sampah terolah daur ulang produk kreatif 24.60 ton/hari, jumlah sampah terolah bahan bakar 1.40 ton/ hari, jumlah sampah terolah biogas 0.31 ton/hari, jumlah sampah yang terolah bank sampah 123.02 ton/hari, jumlah sampah terolah lainnya 104.57 ton/hari, jumlah timbulan sampah rumah tangga 1.212.64 ton/hari, jumlah timbulan sampah kantor 138.78 ton/hari, jumlah timbulan sampah pasar tradisional 126.51 ton/ hari, jumlah timbulan sampah perniagaan 351.66 ton/hari, jumlah timbulan sampah fasilitas publik 371.15 ton/hari, jumlah timbulan sampah kawasan 166.95 ton/hari, jumlah timbulan sampah lainnya 423.21 ton/hari, persentase sisa makanan 54.31%, persentase kayu ranting daun 1.61%, persentase kertas 14.63%, persentase plastik

---

<sup>5</sup> Khulafa Biotechnology. (<https://www.Khulafabiotech.com>). Risky Andrianto. Pengolahan Bantargebang Semrawut. Jumat, 19 Oktober

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.

19.44%, persentase logam 0.48%, persentase kain tekstil 1.47%, persentase karet kulit 2.33%, persentase kaca 1.12%, persentase lainnya 4.61%.<sup>7</sup>

Sebagai Kota yang sedang berkembang upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas mulai dari infratraktur, sarana dan prasarana, sampah, kualitas SDM terus di lakukan perbaikan. Jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan berdampak pada volume sampah yang dihasilkan tiap harinya. Banyaknya sampah yang di hasilkan Kota Surabaya perharinya melibatkan kurang lebih 600 truk sampah yang mengangkut sampah sampai ke TPA. Peningkatan jumlah volume sampah yang tidak diiringi dengan perbaikan sarana dan prasarana mengakibatkan permasalahan sampah menjadi tidak karuan, antara lain masih banyak sampah yang tercecer dan tidak terangkut, pembuangan sampah secara liar/ tidak bertanggung jawab, Kota menjadi kotor, timbul bau tidak sedap, mengurangi daya tampung sungai dan selokan, dan masih banyak lagi dampak yang dihasilkan. Saat ini kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan hidup dianggap sebagai sesuatu yang tabu, mental masyarakat semakin dikonstruksi dalam melakukan pembuangan sampah di sembarang tempat, utamanya pembuangan sampah plastik yang paling banyak dijumpai. Banyaknya sungai-sungai yang tercemar oleh limbah sampah membuat kedangkalan dan penyempitan pada sungai.

TPA Benowo merupakan tempat pembuangan akhir di Kota Surabaya yang saat ini masih terus disempurnakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah digunakan untuk memperluas area pembuangan dan digunakan sebagai daerah penyangga atau buffer zone. Daerah tersebut digunakan sebagai pemisah antara TPA dan pemukiman warga dan juga digunakan sebagai daerah resapan bau. TPA Benowo setiap harinya menerima sampah yang masuk sekitar 1000-2000 ton/hari. Sampah-sampah ini akan ditumpuk terlebih dahulu untuk melalui proses pemisahan dan pengelolaan lebih lanjut.

---

<sup>7</sup> Sistem Informasi Pengolaan Sampah Nasional. ([sipsn.menlhk.go.id/?q=3a-data-umum](https://sipsn.menlhk.go.id/?q=3a-data-umum))

Upaya pemerintah dalam pengurangan pencemaran sampah yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh sektor-sektor terkait dan sesuai dengan pencemaran yang ada di Kota. Pengelolaan sampah yang diterapkan pemerintah adalah rumah kompos, bank sampah, dan pengelolaan sampah menjadi sumber energi listrik. Tujuan dari pengelolaan dan pengembangan konsep tersebut agar jumlah volume sampah di Kota Surabaya mulaidari TPS sampai di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mengalami penurunan volume serta secara tidak langsung juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepedulian lingkungan. Dengan terlibatnya masyarakat sekitar dalam pengelolaan sampah, sangat membantu pemerintah dalam mengurangi pencemaran dan jumlah volume sampah yang ada di Kota Surabaya. Agar masyarakat peduli terhadap lingkungan sekitar dengan melakukan pemilahan dan pengolahan sampah secara mandiri serta masyarakat tau bahwa sampah tersebut yang sudah dilakukan pemilahan dan pengolahan bisa menjadi nilai jual dan membantu peningkatan ekonomi masyarakat.

“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya.”<sup>8</sup> Di dalam lingkungan terdapat tatanan lingkungan hidup yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Setiap harinya lingkungan hidup mengalami perkembangan baik maupun buruk, yang memberikan dampak besar atau kecil dalam perkembangannya. Banyaknya pencemaran lingkungan yang menyebabkan ekosistem dalam kehidupan tidak berjalan dengan baik dan seimbang.<sup>9</sup>

Pencemaran lingkungan terjadi karena perubahan komposisi pada media yang dicemari, seperti pencemaran yang terjadi pada tanah, air, dan udara yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, manusia, proses alam, dan lain-lain yang

---

<sup>8</sup> Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>9</sup> ibid

mengakibatkan penurunan kualitas pada tanah, air, dan udara sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Banyak pabrik industri yang didirikan dan menyebabkan berbagai macam pencemaran baru pada lingkungan hidup. Setiap pembuangan limbah dan asap yang dihasilkan dari pabrik mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan disekitarnya. Faktanya bahwa limbah sampah bisa menyebabkan masalah pencemaran dari skala besar hingga mikroskopis atau kecil.<sup>10</sup> Pencemaran limbah sampah banyak merugikan pada perkembangan lingkungan hidup dan ekosistem pada lingkungan hidup.

Pengendalian pada alam sangat diperlukan terutama pada pencemaran lingkungan yang mengakibatkan tidak stabilnya kondisi alam saat ini. Pencemaran dapat terjadi dimana saja terutama pada lingkungan yang berbasis industri maupun pabrik dengan kepadatan penduduk disekitarnya. Banyaknya penduduk dikawasan pabrik yang kurang akan kesadaran lingkungan membuat kondisi disekitaran pabrik semakin tercemar dan ditambahnya limbah dari pabrik.<sup>11</sup> “Pemerintahan pusat dalam melakukan pengelolaan terhadap lingkungan hidup secara sistematis dan terpadu sudah tertuang dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang Undang tersebut membahas tentang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan.” Dengan melalui susunan peraturan yang sudah ditentukan serta mampu menjaga keutuhan lingkungan dengan baik. Pemerintah pusat maupun daerah harus melakukan penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan yang sudah membahayakan ekosistem dan kelangsungan hidup masyarakat maupun makhluk hidup lainnya, terutama pada pencemaran yang diakibatkan oleh sampah. Masalah sampah merupakan ancaman yang sedang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia, pencemaran sampah tidak hanya terjadi pada lingkungan tetapi juga dilautan. Dampak dari pencemaran limbah sampah yang ada di laut antara lain, rusaknya ekosistem laut membuat makhluk hidup yang ada di air terancam punah. Jika pencemaran limbah sampah

---

<sup>10</sup> Dauvergne, Peter. 2005. Handbook of Global Environmental Politics. University of British Columbia. Canada. Hal 18

<sup>11</sup> Ibid hal 26

tidak ditangani secara serius akan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan secara sistematis, kesehatan manusia dan ekosistem makhluk hidup lainnya juga akan terganggu. Pengelolaan yang dilakukan pemerintah, pihak terkait pengelolaan sampah, dan keterlibatan masyarakat memberikan dampak baik bagi perkembangan Kota Surabaya pada tahun yang akan datang yaitu bebasnya Kota Surabaya dari pencemaran sampah yang ada di lingkungan, serta pemanfaatan timbulan sampah di TPA sebagai sumber energi listrik yang ramah lingkungan.

Dalam melakukan pengelolaan sampah pemerintah mengorganisasikan seluruh lembaga pemerintah, masyarakat Kota Surabaya untuk ikut dalam pengelolaan sampah dan pengurangan volume sampah di Kota Surabaya. Pemerintah memberikan wewenang pada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya merupakan peran utama dalam pengelolaan kebersihan Kota Surabaya. Pemerintah juga mengandeng pihak dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Surabaya, seperti yang dilakukan pemerintah dalam menjalin kerjasama dengan pihak swasta PT. Sumber Organik untuk mengelola sampah yang ada di TPA Benowo dengan memanfaatkan timbulan sampah untuk di jadikan sumber energi listrik yang ramah lingkungan. Pemerintah juga mengorganisasi masyarakat melalui RT/RW setempat untuk melibatkan warganya dalam melakukan pengelolaan dan pemilahan sampah sendiri serta melibatkan masyarakat dalam perkumpulan bank sampah, dan mengikuti kegiatan pengelolaan atau membantu pengelolaan di rumah kompos yang ada di Surabaya. Setidaknya terdapat sekitar 26 rumah kompos di Surabaya termasuk 4 Induk Bank Sampah, 296 unit bank sampah yang ada di tiap kelurahan. Adanya bank sampah di tiap kelurahan dan rumah kompos agar masyarakat terlibat dalam pengelolaan, pengurangan dan pemilahan sampah yang masuk ke TPS dan TPA. Hal ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepedulian lingkungan.

Banyaknya sampah yang terkumpul merupakan sampah rumah tangga yang setiap harinya semakin bertambah dan masih banyak yang berbahan baku plastik. Dari perkumpulan bank sampah yang memiliki anggota cukup banyak bisa membantu meminimalisir sampah di Kota Surabaya agar sampah masuk ke



TPS/TPA tidak terlalu banyak dan sudah terpilah antara sampah organik dan anorganik. Pemerintah Kota Surabaya juga membantu dalam melakukan pengurangan sampah yang akan dibawa ke TPA Benowo. Beberapa tempat pengelolaan sampah yaitu dikawasan TPS 3R Jambangan dan LPS Bratang Jaya. Pada tahun 2003, Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Pemerintah Luar Negeri untuk mengembangkan pengelolaan sampah dengan cara mengubah sampah menjadi bahan kompos atau sumber listrik. “Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2013 tentang Pembelian Sumber Tenaga Listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota.<sup>12</sup>” Semua sampah yang telah terkumpul akan dipisahkan dan dibedakan, sampah yang berbahan baku plastik akan disendirikan karena sulitnya dalam melakukan peruraian. Sampah-sampah yang sudah terkumpul di TPA nantinya akan diolah oleh pihak pengelola untuk dijadikan sumber energi listrik.

“Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.” Peraturan Daerah tersebut menjadi pacuan bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam menanggulangi sampah dengan menggunakan sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan menjaga kebersihan Kota Surabaya. Seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Kota Surabaya beserta elit politik juga ikut serta dalam mengurangi sampah yang ada di Kota Surabaya dengan menjaga kebersihan lingkungan dengan meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan.<sup>13</sup>

Dengan di dukungnya undang-undang persampahan maka organisasi ini dapat diterapkan dalam upaya pengurangan pencemaran sampah. Adanya kesepakatan kerjasama antar pihak terkait pengelolaan sampah, pemerintah memberikan fasilitas berupa mesin pencacah dan penyaring kompos di rumah rumah kompos, untuk masyarakat yang ikut dalam perkumpulan bank sampah di

---

<sup>12</sup> Yohana Efelin Sinaga (2014) Intensitas Pengawasan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Peningkatan Kualitas Sampah Kota Surabaya. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Surabaya

tiap kelurahan pemerintah memberikan reward bagi masyarakat yang sudah memilah sampahnya. Tujuannya agar masyarakat lebih bersemangat dalam memilah dan mengelola sampah secara mandiri dan menyadari bahwa tumoukan sampah yang sudah di proses dan diolah bisa menjadikannya nilai jual.

Cara pemerintah dalam mengorganisasi pengangkutan sampah mulai dari TPS sampai ke TPA yaitu dengan memberikan surat jalan dan data pengangkutan sampah yang di pergunakan untuk masuk ke area TPA Benowo karena tidak semua orang bisa membuang sampahnya ke TPA. Setiap kendaraan yang mengangkut sampahnya sampai ke TPA harus melalui jembatan timbang untuk mengetahui jumlah volume sampah yang di angkut -serta memberikan data diri pengangkut, agar diketahui sumber sampah yang dibawa dan jenis sampah yang masuk ke TPA. Perijinan tersebut di bawa oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, karena yang memiliki wewenang dalam pengelolaan sampah mulaidari TPS sampai TPA adalah DKRTH. Pengorganisasian pemerintah melalui DKRTH dan DLH setelah itu melibatkan pihak lain yaitu instansi pemerintah dan masyarakat, DKRTH menjalankan program Bank sampah di tiap kelurahan agar masyarakat terlibat. DKRTH memberikan tugas ke TPS untuk melakukan pengelolaan sampah dan membawanya ke TPA setelah itu DKRTH bekerjasama dengan PT. Sumber Organik untuk mengelola sampah yang ada di TPA dan menjadikannya sumber energi listrik, DKRTH bersama PT. SO melakukan kerjasama dengan PT. PLN untuk melakukan pemasaran dan penjualan sumber energi listrik yang berasal dari timbulan sampah serta ramah lingkungan kepada masyarakat.

Surabaya sebagai salah satu Kota terbesar ke dua di Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan mengurangi pencemaran lingkungan. Upaya pemerintah Kota Surabaya dalam memerangi ancaman lingkungan yaitu dengan mengurangi penggunaan sampah plastik secara berlebihan, meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kelestarian lingkungan, dan melakukan pengelolaan sampah organik dan anorganik dengan sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*), dengan

begitu sampah yang masuk di TPA bisa berkurang. Pencegahan pencemaran lingkungan dan pengurangan sampah adalah bentuk pembangunan berkelanjutan pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga lingkungan dan di tahun yang selanjutnya agar Kota Surabaya terbebas dari pencemaran lingkungan. Saat ini pemerintah Kota Surabaya menjadikan TPA Benowo sebagai sumber energi listrik yang berasal dari sampah. Ribuan ton sampah yang masuk di area lahan terbuka seluas 25 Hektar dari 37,4 Hektar yang pengelolaannya diserahkan kepada PT. Sumber Organik.<sup>14</sup>

“Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, tugas dan wewenang Pemerintah disebutkan bahwa pemerintah memiliki peranan dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan serta melakukan koordinasi antara lembaga pemerintahan, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah serta melakukan tindakan pengawasan secara serius.<sup>15</sup>”

Dalam pelaksanaan pengorganisasian tersebut pemerintah harus melibatkan semua pihak termasuk pihak swasta, pegawai negeri sipil dan masyarakat Kota Surabaya agar pelaksanaan dalam pengurangan pencemaran sampah di Surabaya bisa teratasi dengan kerjasama semua pihak. Pemerintah juga menyediakan temoah sampah 3R agar masyarakat melakukan pemilahan terhadap sampah yang di buangnya. Untuk sampah-sampah yang tidak terolah akan di bawa ke TPA dan dilakukan pengelolaan secara lanjutan. Pemerintah juga memberikan sosialisasi terhadap masyarakat agar melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan semakin tinggi dan bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti berasumsi bahwa pemerintah harus meningkatkan pengelolaan sampah serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi pencemaran sampah dilingkungan dengan

---

<sup>14</sup> ibid

<sup>15</sup> Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

didukung oleh beberapa strategi dan kebijakan-kebijakan lainnya. Tidak hanya itu pemerintah juga harus tegas dalam menindak masyarakat yang tertangkap basah membuang sampah sembarangan dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu penulis menjadikan masalah tersebut sebagai penelitian karena penulis ingin mengetahui secara detail pengelolaan dan kebijakan pemerintah dalam ruang lingkup mengurangi pencemaran sampah di lingkungan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam tata kelola sampah di Kota Surabaya?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi pencemaran sampah di Kota Surabaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari permasalahan di atas maka peneliti telah menemukan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kota Surabaya dalam tata kelola sampah di Surabaya.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi pencemaran lingkungan dari sampah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini dapat diambil manfaat, diantaranya :

### **1.4.1 Secara akademis**

Penelitian mengenai penumpukan sampah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan merupakan tanggungjawab bagi seluruh elemen masyarakat, elit politik dan pemerintah dalam menanggulangi persoalan ini. Peneliti diharap mampu berkontribusi dalam kemajuan Ilmu Politik di dalam pemahaman politik lingkungan, pengambilan kebijakan para elit politik, dan ikut

serta didalam memberikan referensi bagi kajian-kajian mengenai pengelolaan sampah dan pengurangan sampah untuk kelestarian lingkungan dimasa yang akan datang.

#### **1.4.2 Secara praktis**

Peneliti diharapkan mampu berkontribusi didalam menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan dan pengurangan sampah di Kota Surabaya. Peneliti juga diharapkan mampu untuk membentuk sumber daya manusia yang sadar dan bertanggung jawab atas lingkungan disekitarnya terutama terhadap penggunaan sampah plastik.

#### **1.4.3 Secara pribadi**

Di dalam penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan peneliti dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kebersihan lingkungan, serta mengurangi pencemaran lingkungan dan pengurangan penggunaan sampah plastik yang berlebihan. Dalam bentuk sebagai rasa cinta terhadap lingkungan sekitar dan menjaga kelestarian lingkungan untuk masa mendatang.

### **1.5 Konseptual**

#### **1.5.1 Lingkungan**

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar akan terganggu apabila ekosistem alam tidak berjalan dengan semestinya.<sup>16</sup>”

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.<sup>17</sup>

“Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Tugas dan Wewenang Pemerintah disebutkan bahwa pemerintah memiliki peranan dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan serta melakukan koordinasi antara lembaga pemerintahan, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah serta melakukan tindakan pengawasan secara serius.<sup>18</sup>”

### **1.5.2 Tata Kelola**

“Sesuai dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 disebutkan bahwa proses perubahan bentuk sampah mulai dari karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.” Pengelolaan tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah volume sampah yang terus mengalami peningkatan, selain itu juga memanfaatkan nilai-nilai yang terkandung dalam sampah seperti melakukan daur ulang, mengelola sampah menjadi kompos dan sumber energi. Tujuan dari pengelolaan sampah tersebut agar sesuai dengan visi dan misi pemerintah dalam mengurangi jumlah volume sampah dan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik yang ramah lingkungan.<sup>19</sup>

### **1.5.3 Strategi Pemerintah**

“Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.<sup>20</sup>” Bahwa pemerintah harus mewujudkan situasi dan kondisi permukiman yang sehat dan searah dengan visi dan misi pemerintah, yaitu dengan mengurangi jumlah volume sampah melalui program-program yang telah

---

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Surabaya.

<sup>18</sup> Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>19</sup> Ibid hal 5.

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan*.

dibuat oleh pemerintah (Sistem 3R, Pengomposan, Bank sampah, dan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik yang berbasis ramah lingkungan), peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya lingkungan hidup serta membangun kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya No 11 Tahun 2008 tentang *Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah*.<sup>21</sup>

#### **1.5.4 Kesadaran Masyarakat**

Kesadaran merupakan pilihan dari pikiran manusia yang mengatur akal dan menentukan pilihannya, misal baik atau buruk, bersih atau kotor dan sebagainya. Kesadaran masyarakat sangat mempengaruhi kualitas lingkungan yang ada di sekitarnya, kesadaran terhadap lingkungan berupaya untuk menimbulkan kesadaran masyarakat supaya tidak hanya mengerti mengenai pencemaran, sampah, penghijauan dan sebagainya, tetapi menerapkan dan menjaga kelestarian terhadap lingkungan. Hal ini juga mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat terhadap kepeduliannya pada lingkungan. Peningkatan volume sampah dan pencemaran lingkungan banyak disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya sehingga banyak terdapat pemukiman yang kumuh dan tidak terawat.

Masyarakat harus lebih memperhatikan dan peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Dengan begitu tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan tidak lagi diragukan serta penerapan system 3R yang dilakukan secara mandiri supaya lingkungan tersebut menjadi bersih.

#### **1.5.5 Politik**

“Politik didefinisikan oleh Prof. Ramlan Surbaki sebagai proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang meningkatkan tentang kebijakan bersama masyarakat

---

<sup>21</sup> Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya No 11 Tahun 2008 tentang *Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah*.

yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.<sup>22</sup>” Politik juga memiliki beberapa pendekatan diantaranya pendekatan kekuasaan, pendekatan konflik, pendekatan fungsional, pendekatan analisis wacana politik, pendekatan moral, dan pendekatan institusional.

### **1.5.6 Kebijakan**

Suatu keputusan pemerintah yang telah disusun secara sistematis dan memiliki suatu tujuan yaitu untuk kepentingan publik. “Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti dari tingkat program tertentu. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir, yaitu tercapai atau tidaknya suatu kebijakan tersebut.<sup>23</sup>” Kebijakan Pemerintah dilandasi dengan undang undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan agar memperkuat suatu kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah untuk kepentingan bersama atau publik

## **1.6 Kerangka Teoritik**

### **1.6.1 Politik Lingkungan**

Di dalam konteks politik lingkungan terdapat 5 (Lima) konsep yaitu kebijakan pemerintah, pencemaran sampah, kesadaran masyarakat, tata kelola dan strategi pemerintah. Kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi kemajuan kondisi lingkungan yang saat ini mengalami penurunan. Banyaknya kerusakan dan pencemaran sampah yang terjadi di lingkungan disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dan tidak bertanggung jawabnya masyarakat terhadap lingkungan disekitarnya. Secara sadar ataupun tidak perilaku masyarakat terhadap lingkungan mencerminkan suatu pencemaran lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat sendiri, karena tingkat kepedulian masyarakat yang rendah terhadap lingkungan membuat pencemaran sampah di lingkungan semakin bertambah dan membuat tumpukan sampah menjadi sarang

---

<sup>22</sup> Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. PT. Grasindo. Jakarta.

<sup>23</sup> *Dunn, William N. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Gadjahmada University Press. Yogyakarta*



penyakit serta menjadikan kampung yang kumuh. Tidak sedikit juga masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitar, seperti yang dijelaskan pada teori politik lingkungan bahwa masalah mental lingkungan seringkali sangat kompleks dan saling berhubungan, ketidakpastian sering ada dalam upaya menganggap sebab dan akibat dalam menghasilkan solusi yang efektif. Ditambah dengan kerusakan lingkungan yang irreversible dan banyak masalah lingkungan melibatkan tingkat resiko yang tinggi terhadap manusia dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi sampah serta tingkat kesadaran masyarakat membantu dalam pembangunan berkelanjutan dan dapat digunakan untuk menghasilkan kriteria keberhasilan transformasi hijau. Gagasan inti dalam pembangunan berkelanjutan yang diadopsi dari Jacobs, 1999, hlm. 26-27 :

- *Integrasi* lingkungan ekonomi : mengintegrasikan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan dalam perencanaan dan implementasi.

- *Futurity* : perhatian eksplisit dengan dampak kegiatan yang saat ini pada generasi mendatang.

- *Perlindungan lingkungan* : mengurangi polusi dan degradasi lingkungan dan perlindungan dunia non-manusia.

- *Kualitas hidup* : pengakuan bahwa kesejahteraan manusia didasari oleh lebih dari pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran.

Partisipasi : pengakuan bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan institusi yang disusun untuk memungkinkan semua suara di masyarakat didengar dalam pengambilan keputusan.<sup>24</sup> Mengonsumsi sumber daya, mencemari lingkungan, membuat lanskap atau mengambil kembali tanah dari laut. Manusia tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, mereka dapat mengembalikan dan mengimplementasikan solusi untuk kehancuran tersebut. Dalam pertimbangan ini akan sangat membantu dalam menarik perbedaan antara nilai instrumen dan

---

<sup>24</sup> Connelly, James and Graham Smith. 2003. *Politics and the Environment "From theory to practice" second edition. Routledge. London and New York:6.*

instrinsik. Nilai instrumental memandang dunia *non*-manusia sama berharganya dengan kehidupan manusia. Nilai instrumental menafsirkan sebagai penggunaan langsung dari dunia dalam arti konsumsi, produksi, dan eksploitasi. Kesejahteraan manusia tergantung pada kesejahteraan lingkungan, manusia memiliki insentif kuat dalam pelestarian dan perlindungan.<sup>25</sup>

Terdapat konsekuensi yang penting yaitu tindakan manusia dalam mempertahankan setiap aspek dunia alami bergantung pada kepentingan yang dimiliki manusia, jika tidak memiliki kepentingan bukan alasan instrumental murni untuk melestarikan dunia alami. Sedangkan kepedulian terhadap lingkungan hanya berdasarkan kepentingan yang efektif dalam mendapatkan dukungan untuk hasil kebijakan tertentu. Peran kepentingan yang tercerahkan dari dalam politik lingkungan sebagai pendorong dari aksi lingkungan. Sementara keprihatinan instrumental seperti etika lingkungan harus melampaui kepentingan manusia yang bersifat kontingen yang langsung berhubungan dengan lingkungan dan kesejahteraan manusia.

Konsep normatif tidak dapat ditarik langsung dari konsep ekologis deskriptif. Mempelajari hubungan ekologi tidak akan menuntun ke arah yang tepat, namun pertimbangan dan nilai lingkungan membantu kita memperdalam pemahaman tentang hubungan kemanusiaan dengan dunia *non*-manusia dan lembaga-lembaga politik dan sosial. Ekonomi kapitalis cenderung linier bahwa sumber daya habis, produk diproduksi, dikonsumsi dan akhirnya dibuang ke lingkungan sebagai limbah, sering menyebabkan polusi. Greens berpendapat bahwa ini linear proses ketika ekonomi tumbuh lebih kuat, perlu melingkar dan berkurang dalam ukuran. Produk harus lebih tahan lama dan ketika penggunaan awal mereka selesai seharusnya tidak dibuang, melainkan di perbaiki atau didaur ulang dan digunakan sebagai sumber daya untuk proses produksi lainnya.

Pengelolaan limbah antara lain pengurangan konsumsi keseluruhan dan konsumsi selektif – maksimum penggunaan bahan sekunder, tahan lama, dapat

---

<sup>25</sup> Ibid Hal 16

diperbaiki dan produk daur ulang, minimalis limbah, gunakan kembali, daur ulang (termasuk pengomposan), pembuangan ke TPA hanya sebagai upaya terakhir (kebijakan jangka panjang untuk dihapuskan sepenuhnya). Daur ulang sering dapat dilihat sebagai berusaha memperbaiki teknologi untuk membuat ekonomi kapitalis dalam mengurangi kerusakan lingkungan. Sebuah ekonomi hijau menganggap daur ulang sebagai opsi pengurangan konsumsi, penggunaan kembali. Kebijakan energi akan mengikuti hirarki yang serupa dengan pengelolaan sumber daya dan limbah. Teknologi harus digunakan secara tepat yang membantu pengembangan kemanusiaan dalam pengertian yang luas, tercerahkan dan memiliki dampak yang kecil terhadap dunia non manusia. Kebijakan lingkungan yang muncul seringkali terlalu lemah untuk memenuhi ambisinya. Serangkaian penjelasan dalam upaya mengintegrasikan lingkungan dalam pembuatan kebijakan seringkali gagal. Masalah lingkungan seringkali kompleks, saling terkait dan memiliki efek pada skala yang berbeda (lokal ke global). Masalah yang berbeda memerlukan berbagai jenis solusi, misalnya, pajak, biaya, target, batasan, larangan, atau campuran tanggapan kebijakan yang sesuai.

Tindakan lingkungan yang bertanggung jawab membutuhkan pertimbangan yang serius tentang masalah lingkungan, membutuhkan pemahaman yang jelas tentang istilah yang digunakan. Kebijakan seringkali merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah kolektif, industri mencemari lingkungan karena ini adalah metode pembuangan limbah yang murah, sumber daya terkuras demi mencari keuntungan masing-masing. Intervensi pemerintah yang pertama adalah pengaturan dan kontrol langsung dari badan pengatur seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH). Peraturan wajib biasanya mengambil bentuk undang-undang, regulasi dianggap sebagai yang paling mempengaruhi industri melalui kontrol limbah dan emisi. Namun peraturan juga secara langsung mempengaruhi kehidupan warga negara. Instrumen sukarela yang paling jelas adalah penyediaan informasi dan pendidikan. Langkah dari penyediaan informasi yang sederhana, program pendidikan kewarganegaraan dan sekolah secara eksplisit ditujukan untuk membentuk nilai-nilai dan persepsi orang tentang lingkungan. Prinsip yang

mendasarinya adalah bahwa perilaku hanya dapat diubah jika konsumen menyadari sumber daya yang mereka konsumsi. Dalam sebuah Ecoteam, anggota mengukur dan membandingkan upaya lingkungan individu. Menghasilkan elemen kontrol sosial dan memberikan konsumen rasa tanggung jawab (Van Muijen, 2000, p.161).<sup>26</sup>

Kualitas lingkungan yang semakin memburuk dan akhirnya perekonomian juga ikut menurun dan memburuk. Penggunaan teknologi baru yang dapat merubah ekonomi dan menganut etika yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dapat akan membawa kualitas hidup yang lebih baik, lingkungan yang lebih sehat, dan meningkatkan perekonomian. Dalam meningkatkan kualitas lingkungan melibatkan kombinasi dari kekuatan pasar, peraturan pemerintah, inisiatif swasta dan individu atau masyarakat. Kebijakan lingkungan dan politik selama ini berfokus pada pengendalian udara, air dan pelestarian sumber daya lainnya. Antusias publik dalam mendukung kebijakan lingkungan sangat direspons baik oleh pemerintah. Penanggulangan pencemaran lingkungan dalam pengurang jumlah volume sampah yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah agar jumlah volume sampah di tahun yang akan datang tidak lagi menjadi sumber pencemaran lingkungan.<sup>27</sup>

Peran politik dan pemerintah dalam mengidentifikasi, memahami, dan menanggapi masalah lingkungan tidak terlepas dari pilihan kebijakan yang bersifat politis, untuk menyelesaikan konflik yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan, tujuan sosial dan ekonomi. Hal ini merupakan proses untuk memperjuangkan kepentingan publik. Dalam hal ini kita harus merekonsiliasi tujuan lingkungan dengan bersaing untuk kesejahteraan ekonomi, hak individu dan keadilan sosial, ini juga sebagai pengingat akan peran penting pemerintah dalam menangani masalah lingkungan. Beberapa persepektif terkemuka lainnya

---

<sup>26</sup> Ibid Hal 173

<sup>27</sup> Kraft, Michael. E. 2011. *Environmental Policy and Politics. University of Wisconsin, Green Bay.* Hal 27

pada masalah lingkungan, penyebabnya dan solusi yang harus diperhatikan antara lain sains dan teknologi, ekonomi dan struktur intensif, nilai dan etika.<sup>28</sup>

Pengetahuan yang lebih baik tentang resiko kesehatan manusia yang ditimbulkan oleh bahan kimia beracun bisa memfasilitasi perumusan strategi pengendalian polusi. Pengetahuan baru tentang teknologi produksi juga bisa mengadopsi apa yang disebut hijau praktik bisnis. Peningkatan penelitian masalah lingkungan dan energi dapat diandalkan dalam kondisi lingkungan dan tren dari waktu ke waktu, penggunaan sains yang lebih baik dalam pembuatan kebijakan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Penyebab kerusakan lingkungan karena penyalahgunaan sumber daya alam, air, tanah atau kegagalan dari teknologi. Ahli lingkungan berpendapat bahwa domain paradigma sosial sangat kuat dalam mempengaruhi perilaku pribadi dan prioritas kelembagaan dan merupakan salah satu penyebab paling dasar dari penipisan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan (*Kempton, Boster, dan Hartley 1996; Milbrath 1984, 1989, Paehlke 1989*). Tujuan utama dalam melakukan perlindungan lingkungan antara lain perlindungan system ekologi, hutan, keanekaragaman hayati, meminimalisir dampak negative terhadap kesehatan manusia, dan pendirian penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan (*Paehlke 2000*). Banyak organisasi yang melakukan pengurangan dalam bentuk energi, sumber daya alam, pengurangan pencemaran sampah dengan pemilihan dampak yang kecil terhadap kerusakan lingkungan.

### 1.6.2 Kebijakan

“*Governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut. *Governance* juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, dan pemerintahan (*Kooiman 1993*).<sup>29</sup>”

---

<sup>28</sup> Ibid Hal 29

<sup>29</sup> Sedarmayanti. 2012. *Good Governance “Kepemerintahan yang Baik” bagian kedua*. Mandar Maju. Bandung. Hal 3

Sejalan dengan rencana pemerintah dalam melakukan transformasi dan reformasi yang bersangkutan dengan publik, pemerintah menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat, tetapi masih jauh dari apa yang diharapkan. Secara nyata terlihat dalam berbagai upaya kerjasama yang dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan program pembangunan dan pelayanan publik, maupun dalam pengelolaan bersama sarana dan prasarana publik. Saat ini telah banyak berdiri organisasi *non*-pemerintah atau LSM yang berfungsi mengawasi, mengendalikan dan pelayanan publik. Banyaknya perusahaan swasta yang menjalankan usaha produksi dan jasa publik. “Membuat pemikiran baru yang mengarah kepada perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan dari pola tradisional menjadi pola baru penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat.”

Proses demokrasi politik dan pemerintahan saat ini hanya menuntut profesionalitas serta kemampuan dalam pelayanan public dan menuntut terwujudnya pemerintahan yang baik. Berdasarkan konsepsi tersebut bahwa pada hakekatnya pemerintahan yang baik terdiri dari tiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha atau sektor swasta dan masyarakat madani. Arah kebijakan tersebut sejalan dengan konsepsidan prinsip *Reinventing Government*. Menurut David Osborne dan Ted Gaebler (1992) bahwa pemerintah hendaknya berperan sebagai katalis dimana pemerintah hanya akan dibatasi pada peran pengendalian dan peran melaksanakannya.<sup>30</sup>

Dengan melakukan pembangunan kualitas manusia diharapkan dapat mewujudkan karakteristik *clean and governance* yaitu melakukan pembangunan oleh dan untuk masyarakat, birokrat harus menjalin kerjasama dengan rakyat, mengembangkan organisasi yang mampu beradaptasi dengan lingkungan serta menanggapi tuntutan lingkungannya. Sebagaimana dikuti oleh Nisjar (1997) bahwa *clean and governance* dapat ditempuh melalui kerangka kerja team antar

---

<sup>30</sup> Ibid Hal 16

organisasi, *department* dan antar wilayah, hubungan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan tidak hanya sekedar kemitraan internal pemerintah saja tetapi pemahaman dan komitmen bersama dalam memanfaatkan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.<sup>31</sup>

Interaksi dan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat telah banyak dilakukan di berbagai sektor seperti pengelolaan sampah yang sedang diterapkan saat ini. Pengelolaan program pada umumnya untuk menemukan bentuk yang tepat dalam memecahkan permasalahan yang ada pada masyarakat dan lingkungan, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Bentuk kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat terlibat dalam berbagai upaya kolaborasi dalam melakukan penyusunan, pengendalian, pengawasan, penyelenggaraan, pengelolaan sarana dan prasarana publik. Karakteristik pemerintahan yang baik, paling tidak memiliki tiga karakteristik utama yaitu transparansi, penegak hukum, dan akuntabilitas.

Masalah lingkungan tidak dapat dinyatakan secara proporsional, beberapa tindakan manusia dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Dua strategi kuno *mini-max* dan menghindari perubahan yang tidak dapat diubah. Memberikan prinsip untuk kondisi ketidakpastian epistemologis. Strategi tersebut mempertimbangkan hasil terburuk dari setiap kebijakan dan memilih mana yang akan memberikan konsekuensi paling buruk serta menghindari keputusan yang tidak dapat diubah sebagai panduan umum dalam konteks lingkungan yang memiliki kondisi ketidakpastian. Keanehan alam dan ketidakpedulian merupakan sesuatu yang tidak bisa kita atasi, tetapi sesuatu tersebut harus kita coba untuk mengatasinya.<sup>32</sup>

Manipulasi teknis alam dianggap sebagai bentuk dominasi yang dikaitkan dengan teknologi manusia. Penggunaan ilmu pengetahuan dalam perusakan lingkungan dalam pengembangan teknologi dan kekuatan lain dari kontrol sosial.

---

<sup>31</sup> Ibid Hal 19

<sup>32</sup> Neil, John Oa. 1993. *Environmental Philosophies "Ecology, Policy and Politics"*. Routledge. London and New York. Hal 149

Kebijakan dari metode dan konsepnya telah di proyeksikan bahwa alam semesta tetap terkait dengan dominasi manusia karena mata rantai yang cenderung fatal ke alam dan lingkungan secara keseluruhan. Ketidaksepakatan kebijakan menunjukkan bahwa tidak ada konsensus atau solusi tentang masalah lingkungan. Masalah bagi kebanyakan orang adalah masalah lingkungan yang bisa mengakibatkan kerusakan kualitas hidup dikota-kota yang semakin padat penduduknya. Tidak mengherankan jika beberapa masyarakat memprovokasi kekhawatiran publik terhadap degradasi lingkungan yang terus menerus.<sup>33</sup>

Kebijakan pemerintah dalam menangani masalah lingkungan dan solusinya dengan menggunakan pergeseran teknologi yang ramah lingkungan serta lebih produktif dan perencanaan kebijakan yang lebih komprehensif. Selain itu kesadaran dari setiap masyarakat ataupun instansi pemerintah sangat mempengaruhi tujuan jangka panjang dalam melindungi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan, daur ulang, pemilahan akan sangat membantu dalam mengurangi pencemaran lingkungan yang banyak disebabkan oleh sampah. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah lingkungan, kebijakan pemerintah juga mempengaruhi perubahan dalam pelaksanaannya. Tujuan dari kebijakan lingkungan agar masyarakat pemerintah dan swasta saling bekerjasama dalam melakukan pengurangan pencemaran sampah di lingkungan serta memberikan tanggung jawab pada setiap individu maupun kelompok untuk menjaga lingkungan yang ada disekitarnya agar tetap bersih.<sup>34</sup>

## **1.7 Metode dan Prosedur Penelitian**

### **1.7.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara kegiatan ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan suatu data yang lebih akurat, tujuan dan kegunaannya adalah untuk

---

<sup>33</sup> Kraft, Michael. E. 2011. *Environmental Policy and Politics. University of Wisconsin, Green Bay. Hal 22*

<sup>34</sup> Ibid Hal 37



melakukan pengumpulan data tertentu. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Lisa Harrison dalam buku “Metode Penelitian Politik” memberikan penjelasan bahwa salah satu keunggulan dari penelitian kualitatif yang ada dalam penelitian politik adalah sedalam apa keterlibatan peneliti dalam memahami persoalan penelitian.<sup>35</sup> Dalam pilihan penggunaan pendekatan kualitatif memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Cara yang ditempuh adalah melibatkan diri pada setting sosial terkait tema penelitian yang dipilih. Keterlibatan peneliti tidak sekedar kehadiran pada lokasi penelitian tetapi juga ketekunan peneliti terhadap persoalan penelitian.

Proses-proses penelitian kualitatif dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan metode, dengan menggunakan wawancara secara mendalam dan menempatkan pihak yang diwawancarai sebagai subyek penelitian atau informan yang memiliki pengetahuan dan kemudian dari hasil penelitian ini berbentuk sebuah narasi atau deskripsi yang menggambarkan dan menjelaskan realistik dari sudut pandang yang sesungguhnya ketika peneliti telah mendalami subyek penelitiannya.<sup>36</sup> Dengan demikian, laporan yang disajikan akan berupa kutipan-kutipan dan data untuk memberikan gambaran dalam penyajian laporan.

“Penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi yang digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan menjelaskan maksud dari penelitian yang mengarah pada kesimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan yang muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun melalui pengamatan yang seksama, dalam pengamatan tersebut akan mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-

---

<sup>35</sup> Harrison, Lisa. 2007. Metode Penelitian Politik. Kencana. Jakarta. Hal 86

<sup>36</sup> Ibid Hal 88

catatan. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama yaitu, pertama menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).<sup>37</sup> Secara garis besar, penelitian dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek. Beberapa aspek tersebut adalah aspek tujuan, aspek metode, dan aspek kajian. Berdasarkan pendekatan, secara garis besar dibedakan dua macam penelitian yaitu, penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Keduanya memiliki asumsi, karakteristik dan prosedur penelitian yang berbeda.”

“Metode kualitatif secara garis besar dibedakan dalam dua macam, kualitatif interaktif dan non interaktif. Metode kualitatif interaktif, merupakan studi yang mendalam menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkaran alamiahnya. Peneliti menginterpretasikan fenomena-fenomena bagaimana orang mencari makna dari padanya. Para peneliti kualitatif membuat gambaran yang kompleks, dan menyeluruh dengan deskripsi detail dari kacamata para informan. Kualitatif Interaktif dan Kualitatif *Non-Interaktif*, terdapat beberapa yaitu : Etnografis, Fenomenologis, Historis, Studi Kasus, Teori Dasar, Studi Kritis Analisis Konsep, Analisis Kebijakan, Analisis Historis. Tentang nilai-nilai yang mewarnai narasi. Peneliti interaktif mendeskripsikan konteks dari studi, mengilustrasikan pandangan yang berbeda dari fenomena, dan secara berkelanjutan merevisi pertanyaan berdasarkan pengalaman di lapangan. Peneliti memilih metode ini karena lebih fleksibel dan lebih mudah dipahami, dalam mencari sebuah kasus peneliti bisa terjun dan mengamati kasus tersebut secara langsung.” Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

---

<sup>37</sup> Ibid Hal 89

### **1.7.2 Fokus Penelitian**

Peneliti berfokus pada kebijakan pemerintah dalam tata kelola sampah di Kota Surabaya dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi pencemaran sampah di Kota Surabaya. Dalam penelitian ini terdapat beberapa fokus dari penelitian ini, diantaranya kebijakan pemerintah, tata kelola sampah, upaya atau strategi pemerintah, kesadaran masyarakat dan pencemaran sampah di Kota Surabaya.

Jika dilihat dari kebijakan pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengelolaan sampah terlihat cukup baik dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar serta respons yang baik dari sebagian besar masyarakat Kota Surabaya yang ikut menerapkan kebijakan tersebut. Pemerintah juga menggunakan teknologi yang ramah lingkungan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik.

Penelitian ini berfokus pada lingkungan di Kota Surabaya, dalam kasus pencemaran sampah yang membahayakan ekosistem lingkungan hidup dan warga Kota Surabaya. Dalam upaya mengurangi sampah di Kota Surabaya pemerintah Kota Surabaya dibantu oleh warga kota surabaya untuk mengurangi pencemaran sampah di Kota Surabaya.

### **1.7.3 Subjek Penelitian**

Penelitian ini ditujukan kepada Bapak Agustinus Ketua Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, Bapak Suharto Sekretariat Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan DPRD Kota Surabaya, Ibu Kholillah (masyarakat sekitar TPA Benowo), Bapak Yulianto sebagai Humas di PT. Sumber Organik atau TPA Benowo (Tempat Pembuangan Akhir), Bapak Wawan Some (Koordinator Organisasi Nol Sampah). Pemilihan subjek tersebut didasari oleh keikutsertaan para instansi pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan Kota Surabaya dan pengurangan serta pengolahan sampah plastik

yang ada di Kota Surabaya. Penentuan subjek penelitian juga akan menggunakan penambahan sampling jika mendapat rekomendasi dari salah satu narasumber.

#### **1.7.4 Instrumen Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara yang berisi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka dan tertutup, hal ini dilakukan peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang jelas, tidak keluar dari konteks permasalahan dan secara maksimal. Peneliti juga dibekali beberapa alat berupa kamera, perekam suara (*handphone atau recorder*), dan buku catatan untuk meminimalkan kesalahan yang dilakukan oleh peneliti.

#### **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini, peneliti dalam teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara, studi literatur, dan observasi.

Pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut dan akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara.

“Wawancara adalah alat yang baik untuk menghidupkan topik riset. Wawancara juga merupakan metode yang bagus untuk pengumpulan data tentang subyek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif serta tidak banyak literatur yang membahasnya.”<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid Hal 104

Berdasarkan tiga klarifikasi wawancara menurut Lisa Harrison, peneliti akan menggunakan wawancara tak-terstandarisasi, dimana peneliti akan melakukan wawancara dalam bentuk percakapan yang mengalir bebas, dengan bergantung pada interaksi antara peneliti dengan informan tanpa menyimpang dari tema riset yang akan mendapatkan data kualitatif secara detail.

“Yang disebut sebagai wawancara informal, fokus, tak terstruktur atau bebas. Wawancara ini dilakukan dalam bentuk bebas percakapan yang mengalir bebas, bergantung pada kualitas interaksi sosial antara investigator dan informan, yang dapat dluruskan kembali oleh pewawancara jika percakapan menyimpang dari tema studi riset.<sup>39</sup>” Tujuannya adalah mendapatkan data kualitatif yang mendetail. Struktur ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dan pengungkapan makna. Yaitu, mengajukan pertanyaan apabila dirasa tepat dan memilih sendiri susunan kata yang tepat, sebab “respons orang sangat dipengaruhi oleh bentuk susunan kata dalam pertanyaan. Saat melangkah dari bentuk wawancara terstandarisasi ke wawancara tak-terstandarisasi, membutuhkan lebih sedikit pertanyaan formal. Banyak pewawancara kualitatif menggunakan aide-memoire, yaitu daftar ringkas topik yang akan ditanyakan, meski tidak dalam urutan tertentu. Hal ini untuk membantu memastikan agar wawancara tetap fokus, tanpa mengurangi kelancaran alur diskusi.”

#### **1.7.6 Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif. Alasan penggunaan metode kualitatif yang pertama adalah, lebih mudah menyesuaikan di lapangan apabila berhadapan langsung dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat peneliti subjek penelitian. Teknik analisis data bertujuan untuk menyusun data agar tersusun lebih rapi, dimana dimulainya wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait serta pengumpulan bahan-bahan yang telah di dapat untuk menunjang penelitian.

---

<sup>39</sup> Ibid Hal 106

Adapun proses analisis data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni : Reduksi data atau penyederhanaan data, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya, paparan data digunakan dalam menyusun data dari satu kesatuan. Penarikan suatu kesimpulan.

Pada analisis data penulis harus terlebih dahulu memisahkan data antara data primer dengan data sekunder. Data primer yang sumbernya berasal dari wawancara harus terlebih dahulu di transkrip, sedangkan untuk data sekunder di seleksi lagi mana yang akan digunakan atau dilampirkan dan mana yang akan di interpretasikan untuk mendukung data primer. Di dalam proses analisis data kualitatif harus ada penggolongan data yang bertujuan untuk mencari persamaan dan perbedaan dari klasifikasi data yang tersedia. Selanjutnya adalah menghubungkan hasil temuan data dengan referensi, jurnal, dokumen dan teori yang digunakan untuk mendapatkan hasil secara akurat.